Vol.17.2. November (2016): 1635-1666

KINERJA DINAS PARIWISATA BALI BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Putu Dewi Suryantari YS¹ I Gusti Ketut Agung Ulupui ²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: dewisuryantariyoshi@gmail.com/ telp: +6285 737 337 213 ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Bali tahun 2015 dengan metode *value for money*. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pencapaian keuangan Dinas Pariwisata Bali yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis pada seluruh program yang dilaksanakan, yaitu terhadap tujuh program maka dapat diketahui bahwa berdasarkan analisis dari aspek ekonomi, seluruh program sudah berjalan ekonomis dengan adanya penghematan anggaran pada setiap program. Berdasarkan analisis dari aspek efisiensi seluruh program sudah berjalan efisien. Berdasarkan analisis dari aspek efektivitas ada satu program yang berjalan kurang efektif yaitu pada program pengembangan destinasi pariwisata.

Kata kunci: kinerja, value for money, ekonomi, efisiensi, efektivitas

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the performance of tourism in Bali in 2015. The data used in this research is the realization of the financial achievement of the Bali Tourism Office located on Government Agencies Performance Accountability Report (LAKIP) in 2015. Data collection methods used were documentation and interviews, Data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. Based on the analysis on the entire program is implemented, namely the seven programs it is known that based on the analysis of the economic aspects, the entire program has been running economical with their budget savings in each program. Based on the analysis of aspects of the efficiency of the entire program is already running efficiently. Based on an analysis of the effectiveness of existing aspects of the program that runs less effective, namely in tourism destination development program.

Keywords: performance, value for money, economy, efficiency, effectiveness.

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik (Mardiasmo, 2009). Masyarakat sering menilai organisasi sebagai suatu organisasi yang hanya

melakukan pemborosan atau inefesiensi (Wandari, 2015). Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut agar lembaga – lembaga sektor publik melakukan suatu akuntabilitas public dan keterbukaan (Fattah, 2012).

Menurut Moxham (2009), pengukuran merupakan sebuah konsep yang relatif sederhana, untuk dapat menilai kinerja berdasarkan pedoman atau aturan yang sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja dikembangkan dari asumsi bahwa organisasi akan dapat beroperasi dalam lingkungan yang stabil apabila ada indikator ukuran kinerja (Franco, 2012). Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu mengevaluasi mengenai proses organisasi dan hasilnya, pada umumnya melibatkan dokumentasi dalam jumlah besar (Zurich, 2013).

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran (Lucianetti, 2014). Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2006).

Pada pengimplementasian manajemen strategis, pengukuran kinerja adalah faktor yang penting yang harus diperhatikan (Kloviene, 2009). Suatu sistem yang

memiliki tujuan untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial

dan nonfinansial yang dapat membantu manajer public adalah sistem pengukuran

kinerja sektor publik (Taylor, 2013). Penilaian kinerja meliputi penilaian berdasarkan

audit efesiensi, efektivitas, dan ekonomi yang pada dasarnya adalah perluasan dari

audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya (Sangmi, 2010). Organisasi dapat

melakukan suatu sistem pengendalian organisasi dengan sistem pengukuran kinerja

(Richard et al, 2009). Sistem pengukuran kinerja menunjukkan apakah organisasi

berada pada jalur pencapaian tujuan yang diinginkan (Philippe, 2011).

Tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan

kinerja secara komprehensif karena dalam kinerja organisasi sektor publik memiliki

sifat multidimensional (Emmi, 2011). Lembaga sektor publik memiliki orientasi

untuk lebih mengendepankan kepentingan publik dan tidak berorientasi pada laba

sebagai tujuan akhirnya (Wood, 2010). Maka dari itu, perlu dikembangkan ukuran

kinerja non-finansial. Agar hasil pengukuran mendapatkan hasil yang menyeluruh

dan objektif maka metode pengukuran kinerja harus dibuat sedemikian rupa (Pavlov,

2011). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan konsep value for money

yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek efesiensi, efektivitas dan ekonomis dalam

pengukuran kinerja Dinas Pariwisata.

Value for money adalah inti dari pengukuran kinerja di dalam organisasi sektor

publik karena kinerja pemerintah harus mempertimbangkan masukan, keluaran, dan

proses dan tidak bisa menilai dari keluaran yang dihasilkan saja (Naim, 2013).

1637

Masyarakat mengharapkan bahwa lembaga sektor public memiliki akuntabilitas publik yaitu, pengadaan dan alokasi sumber daya dapat dilakukan ekonomis, efesien, dan efektif (Mardiasmo, 2009).

Pariwisata merupakan salah satu andalan Pulau Bali dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Bali merupakan pusat pariwisata di Indonesia menurut data Kementrian Pariwisata menyebutkan bahwa Pulau Bali menduduki peringkat pertama setingkat Asia.

Salah satu artikel dalam kompas.com (2016) menyebutkan menurut survei yang dilakukan majalah *Travel Leisure* menyatakan bahwa pulau wisata terbaik kedua di seluruh dunia pada tahun 2015 adalah Pulau Bali setelah Kepulauan Ekuador, Galapagos. Urutan ketiga diraih oleh Maldives. Urutan keempat diraih oleh Tasmania, Australia dan urutan kelima diraih oleh Santorini, Yunani.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai regulator dan pengorganisasian aturanaturan dan kebijakan yang mendukung pariwisata Bali sangat berperan penting pada
kemajuan kepariwisataan Bali. Agar lebih memiliki daya tarik maka Dinas Pariwisata
mengembangkan dan menggali potensi yang terdapat di Bali. Peningkatan jumlah
wisatawan mancanegara dan domestik yang datang ke Bali tidak terlepas dari usahausaha yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam memperkenalkan dan memajukan
kepariwisataan Bali.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya.

Penelitian ini akan menganalisis kinerja Dinas Pariwisata Bali dengan konsep value

for money, terdapat aspek - aspek diantaranya adalah ekonomi, efisiensi dan

efektivitas pada seluruh program kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada data

LAKIP.

Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali sering dinilai hanya dari aspek masukan

dan keluaran. Instansi ini dinilai dikatakan berhasil apabila bisa menyerap anggaran

100% dan melaksanakan program tahunan, tanpa ada penilaian pada aspek hasil,

manfaat, dan juga dampak. Oleh karena itu diperlukan ukuran nonfinansial dalam

pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Berdasarkan penjelasan latar belakang

yang sudah dijelaskan, maka peneliti dapat merumuskan penelitian yaitu

bagaimanakah kinerja Dinas Pariwisata Bali dinilai dari aspek ekonomi,

bagaimanakah kinerja Dinas Pariwisata Bali dinilai dari aspek efisiensi, dan

bagaimanakah kinerja Dinas Pariwisata Bali dinilai dari aspek efektifitas. Penelitian

ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Bali dinilai dari

aspek ekonomi, untuk mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Bali dinilai dari aspek

efisiensi, Untuk mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Bali dinilai dari aspek

efektifitas. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis dan

praktis, yaitu berkontribusi pada pengembangan ilmu pegetahuan dan memberikan

informasi sekaligus uman balik mengenai pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Sugiyono,

1639

2013). Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Bali dengan menggunakan analisis *value for money*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *value for money* dalam pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Bali. Dinas Pariwisata Bali merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pilihan di bidang pariwisata. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja Dinas Pariwisata Bali berdasarkan konsep *value for money* yang dinilai berdasarkan tiga aspek, yaitu efektivitas, efesiensi, dan ekonomis. Aspek yang diamati adalah kinerja program Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan metode *value for money* yang terdiri dari tiga aspek, antara lain: kinerja berdasarkan aspek ekonomis, kinerja berdasarkan aspek efisiensi, kinerja berdasarkan aspek efektifitas.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu target anggaran dan realisasi anggaran program, data target kinerja dan capaian kinerja program, serta data hasil *output* program yang terdapat pada LAKIP tahun 2015. Sumber data berasal dari Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pariwisata Bali berkaitan dengan program kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015. Sedangkan data sekunder adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2015 yang diperoleh dengan dokumentasi.

Dokumentasi dan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data

dengan cara mengumpulan dan menganalisa dokumen-dokumen. Data yang didapat

dari metode ini adalah data mengenai rencana dan realisasi program pada Dinas

Pariwisata Bali tahun 2015 yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung. Wawancara dalam

penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan wawancara yang

berkaitan dengan hasil capaian dari kinerja Dinas Pariwisata Bali yang dikonfirmasi

kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Kepala Bidang Sumber Daya

Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Kepala Bidang Pengendalian

Usaha Pariwisata.

Untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Bali menggunakan metode value for

money maka digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berikut ini teknik

analisis data yang digunakan pada masing-masing aspek yaitu pengukuran ekonomi,

dimana penelitian ini menggunakan perhitungan pengukuran ekonomi yang

dikembangkan oleh Arfan (2014) yaitu sebagai berikut.

Ekonomi = Target anggaran per anggaran – Realisasi anggaran per anggaran

Efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input

pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan

kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Efisiensi diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

1641

Efisiensi = (Output/Input)*100%

Berikut ini adalah kriteria pengukuran efisiensi kinerja keuangan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi	Kriteria
90 s/d 100	Sangat Efisien
80 s/d 89,99	Efisien
70 s/d 79,99	Cukup Efisien
60 s/d 69,99	Kurang Efisien
< 59,99	Tidak Efisien
C 1 D	(2010 110)

Sumber: Prasetyo (2010: 110)

Pengukuran efektivitas, dimana penelitian ini menggunakan perhitungan yang dikembangkan oleh Arfan (2014) yaitu efektivitas sama dengan capaian kinerja dibagi target dikali seratu persen. Berikut ini adalah kriteria efektivitas kinerja keuangan yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

initial dictionities	immerja rieuumgum
Efektifitas	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% s/d 100%	Efektif
80% s/d 90%	Cukup Efektif
60% s/d 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Sudiarsa, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kinerja dengan metode *value for money* dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur setiap program kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata selama tahun 2015 berdasarkan aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektifvitas yang dapat dilihat pada data target anggaran dan realisasi anggaran program, data

target kinerja dan capaian kinerja program dan data hasil *output* dari masing-masing program yang ada pada LAKIP.

Tabel 3. Pengukuran Ekonomi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	20	15	Penghematan	Dalam Rupiah Output	
110	nogamin.	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	2015	% %	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat			0	100	
	y y	3.213.000	3.213.000			
2.	Penyediaan jasa komunikasi,			42.442.000	100	
	sumber daya air dan listrik	165.920.000	123.478.000			
3.	Pelayanan jasa kebersihan			132.000	100	
	kantor	89.100.000	88.968.000			
4.	Penyediaan alat tulis kantor			172.000	100	
		28.542.400	28.370.400			
5.	Penyediaan barang cetakan dan			421.100	100	
	penggandaan	95.900.700	95.479.600			
6.	Penyediaan komponen instalasi			30.900	100	
	listrik/penerangan bangunan	11.268.900	11.238.000			
	kantor					
7.	Penyediaan bahan bacaan dan			0	100	
	peraturan perundang-undangan	10.680.000	10.680.000			
8.	Penyediaan makanan dan			225.000	100	
	minuman	17.865.000	17.640.000			
9.	Rapat-rapat koordinasi dan	200 000 000	100 011 000	156.000	100	
	konsultasi keluar daerah dan	200.000.000	199.844.000			
1.0	dalam daerah			200.000	100	
10.	Upacara keagamaan	40,000,000	20.700.000	300.000	100	
	Total	40.000.000	39.700.000		100	
	Total	662.490.000	618.611.000	43.879.000	100	
		002.490.000	018.011.000	43.879.000		

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 3 diketahui bahwa program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Hal ini dapat terlihat dari adanya penghematan anggaran kegiatan dimana penggunaan total anggaran sebesar Rp. 662.490.000, dikurangi realisasi anggaran sebesar Rp. 618.611.000, sehingga total penghematan yang dilakukan pada program pelayanan

administrasi perkantoran adalah Rp. 43.879.000, dan kegiatan pengadaan lainnya juga mengalami penghematan.

Tabel 4. Pengukuran Ekonomi pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

				Penghematan	Dalam Rupiah	
No.	Kegiatan	20	2015		Output%	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	2015		
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	228.000.000	223.246.000	4.754.000	100	
	Total	228.000.000	223.246.000	4.754.000	100	

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 4 diketahui bahwa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 223.246.000 dari anggaran sebesar Rp. 228.000.000 dan menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp. 4.754.000 dengan *output* sebesar 100%.

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 5 diketahui bahwa Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Total penghematan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 117. 553. 894, dari total anggaran sebesar Rp. 1.856.670.000 dan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.739.116.106, dan kegiatan lainnya juga mengalami penghematan.

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 6 diketahui bahwa program pengembangan destinasi pariwisata tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Pada kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata realisasi anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 142.959.100 dari anggaran sebesar Rp. 206.219.900 dan menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp. 63.260.800 dengan *output* sebesar 100%. Selisih antara realisasi anggaran dan target anggaran menunjukan bahwa pengembangan destinasi pariwisata tahun 2016 sudah berjalan ekonomis.

Tabel 5.
Pengukuran Ekonomi pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	3		<u> </u>		Dalam Rupiah
No	Kegiatan	20	15	Penghematan 2015	Output %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		, •
1.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di	1.124.329.610	1.047.074.006	77.255.604	100
2.	dalam dan luar negeri Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	207.470.000	198.978.100	8.491.900	100
3.	Menyusun data statistik kepariwisataan	147.083.800	146.045.950	1.037.850	100
4.	Bintek/ujian pemandu wisata/pramuwisata	66.798.190	63.819.250	2.978.940	100
5.	Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	185.029.500	161.689.300	23.340.200	100
6.	Penyusunan data usaha pariwisata	100.958.900	100.434.500	524.400	100
7.	Pengembangan penyelenggaraan pariwisata usia lanjut	25.000.000	21.075.000	3.925.000	100
	Total	1.856.670.000	1.739.116.106	117.553.894	100

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Tabel 6. Pengukuran Ekonomi pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

No	Kegiatan	20	015	Penghematan	Dalam Rupiah Output	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	- 2015	%	
1.	Pengembangan daerah tujuan wisata	206.219.900	142.959.100	63.260.800	100	

Total	206.219.900	142.959.100	63.260.800	100
-------	-------------	-------------	------------	-----

Tabel 7.
Pengukuran Ekonomi pada Program Pengembangan Kemitraan

	<u> </u>				Dalam Rupiah
No	Kegiatan		2015	Penghematan	Output %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	262.968.500	219.563.400	43.405.100	100
2.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	52.786.810	49.447.950	3.338.860	100
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	172.013.500	158.776.250	13.237.250	100
4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	90.692.200	84.552.900	6.139.300	100
5.	Pelaksanaan forum kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)	113.700.800	95.362.913	18.337.887	100
	Total	692.161.810	607.703.413	84.458.397	100

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 7 diketahui bahwa Program pengembangan kemitraan tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Hal ini dapat terlihat dari adanya penghematan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Total penghematan dari program pengembangan kemitraan sebesar Rp. 84.458.379 dari total target anggaran sebesar Rp. 692.161.810 dan terealisasi sebesar Rp. 607.703.431 dan

kegiatan lainnya juga mengalami suatu penghematan, sehingga program ini dapat dikatakan ekonomis.

Tabel 8.
Pengukuran Ekonomi pada Program Pengembangan Pariwisata

T 7 • 4	20	15	D 1 4	Dalam Rupiah
Kegiatan	20.	15	O	Output %
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	2013	
Mengendalikan usaha				100
jasa kepariwisataan	111.865.000	105.224.900	6.640.100	
Pengawasan dan				100
mengendalikan usaha	120.487.550	112.449.400	8.038.150	
sarana pariwisata				
<u> </u>				100
kepariwisataan daya tarik wisata	254.589.900	225.315.600	29.274.300	
Penganugerahan Tri				100
Hita Karana Award	100.000.000	96.389.000	3.611.000	
Total	586.942.450	539.378.900	47.563.550	100
	jasa kepariwisataan Pengawasan dan mengendalikan usaha sarana pariwisata Mengendalikan usaha kepariwisataan daya tarik wisata Penganugerahan Tri Hita Karana Award	Mengendalikan usaha jasa kepariwisataan Pengawasan dan mengendalikan usaha sarana pariwisata Mengendalikan usaha kepariwisataan daya tarik wisata Penganugerahan Tri Hita Karana Award 100.000.000	Anggaran(Rp)Realisasi(Rp)Mengendalikan usaha jasa kepariwisataan Pengawasan dan mengendalikan usaha sarana pariwisata Mengendalikan usaha kepariwisataan daya tarik wisata111.865.000 105.224.900112.449.400254.589.900225.315.600225.315.600112.449.400254.589.900225.315.600254.589.90096.389.000	Anggaran(Rp) Realisasi(Rp) Mengendalikan usaha jasa kepariwisataan Pengawasan dan mengendalikan usaha sarana pariwisata Mengendalikan usaha kepariwisataan daya tarik wisata Penganugerahan Tri Hita Karana Award 111.865.000 105.224.900 6.640.100 8.038.150 2015 112.449.400 2.224.900 8.038.150 2015 224.589.900 2.234.900 8.038.150 2015 29.274.300 8.038.150 2015 29.274.300 8.038.150 2015 29.274.300 8.038.150 2015 29.274.300 8.038.150 2015 29.274.300 8.038.150 2016 29.274.300 8.038.150 2017 29.274.300 8.038.150 2018 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150 2019 29.274.300 8.038.150

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 8 diketahui bahwa program pengembangan pariwisata tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Hal ini dapat terlihat dari adanya penghematan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Total penghematan yang dilakukan program pengembangan pariwisata adalah sebesar Rp. 47.563.550, dimana terdapat selisih dari target dan realisasi anggaran, dan kegiatan lain juga mengalami penghematan anggaran.

Tabel 9. Pengukuran Ekonomi pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

			Dalam Rupiah
No.	Kegiatan	2015 Penghematan	Output %

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	2015	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata	584.258.500	554.666.760	29.591.740	100
	Total	584.258.500	554.666.760	29.591.740	100

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 9 diketahui bahwa Program pengembangan dan pengelolaan produk wisata tahun 2015 sudah berjalan ekonomis. Pada kegiatan meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 554.666.760 dari anggaran sebesar Rp. 584.258.500 dan menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp. 29.591.740 dengan *output* sebesar 100% maka program ini dapat dikatakan ekonomis. Selisih antara realisasi anggaran dan target anggaran menunjukan bahwa pengembangan destinasi pariwisata tahun 2016 sudah berjalan ekonomis.

Pengukuran kinerja berdasarkan aspek efesiensi, Efisiensi adalah perbandingan hasil dibagi input atau masukan yang dikaitkan berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan untuk dicapai (Mardiasmo, 2009: 4). Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio efisiensi tersebut maka suatu program dapat dikatakan efisien.

Tabel 10. Pengukuran Efisiensi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Input		Output/hasil			Pers	Efisiensi		
		Target	Realisasi	Ta	rget	Rea	alisasi	Input	Output	-
1.	Penyediaan jasa	3.213.000	3.213.000	12	bulan	12	bulan	100	100	100

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666

2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	165.920.000	123.478.000	12	bulan	12	bulan	74	100	134,4
3.	Pelayanan jasa kebersihan kantor	89.100.000	88.968.000	12	bulan	12	bulan	99	100	101,0
4.	Penyediaan alat tulis kantor	28.542.400	28.370.400	12	bulan	12	bulan	99	100	101,0
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.900.700	95.479.600	12	bulan	12	bulan	99	100	101,0
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.268.900	11.238.000	12	bulan	12	bulan	99	100	101,0
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10.680.000	10.680.000	12	bulan	12	bulan	100	100	100
8.	Penyediaan makanan dan minuman	17.865.000	17.640.000	12	bulan	12	bulan	98	100	102,0
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	200.000.000	199.844.000	12	bulan	12	bulan	99	100	101,0
10.	Upacara keagamaan	40.000.000	39.700.000	12	bulan	12	bulan	99	100	101,0
	Total	662.490.000	618.611.000	1	2		12	97	100	104,2

Berdasarkan data pada Tabel 10 mengenai pengukuran kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan aspek efisiensi pada program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2015 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 104,2 %. Hal ini yang membuat program pelayanan administrasi perkantoran secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efisien.

Tabel 11.

Pengukuran Efisiensi pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	In	put	Outp	out/hasil Persentase		Efisiensi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Input	Output	-
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	228.000.000	223.246.000	100%	100%	97	100	103,1
	Total	228.000.000	223.246.000	100%	100%	97	100	103,1

Berdasarkan data pada Tabel 11 mengenai pengukuran kinerja Dinas Pariwisata tahun 2015 berdasarkan sarana diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 103,1%. Hal ini yang membuat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efisien.

Berdasarkan data pada Tabel 12 mengenai pengukuran kinerja berdasarkan aspek efisiensi pada program pengembangan pemasaran pariwisata tahun 2015 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 108%. Sehingga program pengembangan pemasaran pariwisata dapat dikatakan efesien. Hal ini membuat program pengembangan pemasaran pariwisata secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efisien.

Tabel 12.
Pengukuran Efisiensi pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

		wir Errerer per		8	w			_ •• ·	- 100000	
No.	Kegiatan	Inj	Input Output/hasil		Pers	Efisie				
		Target	Realisasi	T	arget	Rea	alisasi	Inp	Outp	nsi
								ut	ut	
1.	Pelaksanaan promosi	1.124.329.610	1.047.074.006	11	event	11	Event	93	100	108

2.	pariwisata nusantara dalam dan luar negeri Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak	207.470.000	198.978.100	510	buku	510	Buku	95	100	105
	dan elektronik									
3.	Menyusun	147.083.800	146.045.950	350	buku	350	Buku	99	100	101
	data statistik kepariwisataa									
	n									
4.	Bintek/ujian pemandu	66.798.190	63.819.250	32	orang	32	Orang	95	100	105
	wisata/pramu wisata									
5.	Penyusunan rencana induk pengembanga n pariwisata daerah	185.029.500	161.689.300	1	draft	1	Draft	99	100	101
6.	Penyusunan data usaha	100.958.900	100.434.500	1	direkt ori	1	Direkt ori	84	100	119
7.	pariwisata Pengembanga	25.000.000	21.075.000					84	100	119
	n penyelenggar aan pariwisata usia lanjut									
	Total	1.856.670.000	1.739.116.106					93	100	108

Berdasarkan Tabel 13 pengukuran efisiensi pada program pengembangan destinasi pariwisata tahun 2015 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 144%.

Tabel 13. Pengukuran Efisiensi pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

					,					
No.	Kegiatan	Inp	out	Output/hasil			il	Persentase		Efisiensi
		Target	Realisasi	Ta	arget	Re	alisasi	Input	Output	
1.	Pengembangan daerah tujuan	206.219.900	142.959.100	5	desa	5	Desa	69	100	144,9

wisata							
Total	206.219.900	142.959.100	5 desa	5 desa	69	100	144,9

Tabel 14. Pengukuran Efisiensi pada Program Pengembangan Kemitraan

No.	Kegiatan	Inj	put	Outp	out/hasil	Pers	sentase	Efisiensi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Input	Output	_
1.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	262.968.500	219.563.400			83	100	120
2.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	52.786.810	49.447.950	35 orang	35 orang	93	100	108
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	172.013.500	158.776.250	1.530 orang	1.530 orang	100	100	100
4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	90.692.200	84.552.900	100 lokasi	100 lokasi	100	100	100
5.	Pelaksanaan forum kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)	113.700.800	95.362.913			83	100	120
	Total	692.161.810	607.703.413			77	100	110

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan pada Tabel 14 mengenai pengukuran efisiensi pada program pengembangan kemitraan tahun 2015 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 110%.

Tabel 15.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666

Pengukuran Efisiensi pada Program Pengembangan Pariwisata

No.	Kegiatan	Inp	out	Outpu	ıt/hasil	Pers	entase	Efisiensi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Input	Output	-
1.	Mengendalikan usaha jasa kepariwisataan	111.865.000	105.224.900	250 pramuwisata	250 pramuwisata	94	100	106
2.	Pengawasan dan mengendalikan usaha sarana pariwisata	120.487.550	112.449.400	100 hotel	100 hotel	93	100	108
3.	Mengendalikan usaha kepariwisataan daya tarik wisata	254.589.900	225.315.600	220 DTW	220 DTW	88	100	114
4.	Penganugerahan Tri Hita Karana Award	100.000.000	96.389.000			96	100	104
	Total	586.942.450	539.378.900			93	100	108

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 15 mengenai pengukuran efisiensi pada program pengembangan pariwisata tahun 2015 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 108%. Berdasarkan perngukuran efesiensi program pengembangan pariwisata maka dapat disimpulkan bahwa program pengembangan pariwisata tahun 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efisien.

Tabel 16. Pengukuran Efisiensi pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

			_ 022802000		11280000			
No.	Kegiatan	In	put	Outp	ut/hasil	Pers	sentase	Efisien
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Input	Output	si

1. Meningk

atkan kualitas sumber dayapari wisata	584.258.500	554.666.760	6 orang	6 orang	94	100	106,4
Total	584.258.500	554.666.760	6 orang	6 orang	94	100	106,4

Berdasarkan data pada Tabel 16 mengenai pengukuran efisiensi pada program pengembangan dan pengelolaan produk wisata tahun 2015 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 106,4%. Sehingga program pengembangan dan pengelolaan produk wisata secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efisien.

Pengukuran kinerja berdasarkan aspek efektivitas, Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009: 134).

Berdasarkan data pada Tabel 17 mengenai pengukuran kinerja berdasarkan aspek efektivitas pada program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 97%, sehingga membuat program pelayanan administrasi perkantoran cukup efektif. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang rasio efektivitasnya hanya 74% yaitu pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Tabel 17.

Pengukuran Efektivitas pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan 2015 Efektivitas

Target % Capaian
Kinerja %

Penyediaan jasa surat menyurat

100

100

100

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666

2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	74	74
3.	Pelayanan jasa kebersihan kantor	100	99	99
4.	Penyediaan alat tulis kantor	100	99	99
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	99	99
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	99	99
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	100
8.	Penyediaan makanan dan minuman	100	98	98
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	100	99	99
10.	Upacara keagamaan	100	99	99
	Jumlah	100	97	97

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Tabel 18.
Pengukuran Efektivitas pada Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	2	Efektivitas	
		Target %	Capaian Kinerja%	2015%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	100	97,92	97,92
	Jumlah	100	97,92	97,92

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 18 mengenai pengukuran kinerja berdasarkan aspek efektivitas pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 97, 92%, sehingga membuat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dikatakan cukup efektif.

Berdasarkan data pada Tabel 19 mengenai pengukuran kinerja berdasarkan aspek efektivitas pada program pengembangan pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 94%,

sehingga membuat program pengembangan pemasaran pariwisata dikatakan cukup efektif.

Tabel 19.
Pengukuran Efektivitas pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

No	Kegiatan	20)15	Efektivitas 2015
		Target %	Capaian Kinerja %	•
1.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	100	93	93
2.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	100	95,91	96
3.	Menyusun data statistik kepariwisataan	100	99	99
4.	Bintek/ujian pemandu wisata/pramuwisata	100	96	96
5.	Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	100	87	87
6.	Penyusunan data usaha pariwisata	100	99	99
7.	Pengembangan penyelenggaraan pariwisata usia lanjut	100	84	84
	Jumlah	100	94	94

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data Tabel 20 mengenai pengukuran efektivitas pada program pengembangan destinasi pariwisata Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 69%, sehingga membuat program pengembangan pemasaran pariwisata dikatakan kurang efektif karena belum mampu untuk mencapai target yang ditentukan.

Tabel 20.
Pengukuran Efektivitas pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

No.	Kegiatan	2	015	Efektivitas
		Target %	Capaian	2015 %
			Kinerja %	

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666

1. Pengembangan daerah tujuan wisata	100	69	69
Jumlah	100	69	69

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 21 mengenai pengukuran efektivitas pada program pengembangan kemitraan Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 89%.

Tabel 21. Pengukuran Efektivitas pada Program Pengembangan Kemitraan

No	Kegiatan		Efektivitas	
		Target %	Capaian Kinerja %	2015 %
1.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	100	83	83
2.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	100	93	93
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	100	92	92
4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	93	93
5.	Pelaksanaan forum kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)	100	83	83
	Jumlah	100	89	89

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 22 mengenai pengukuran efektivitas pada program pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 93%, sehingga membuat program pengembangan pariwisata dikatakan cukup efektif.

Tabel 22. Pengukuran Efektivitas pada Program Pengembangan Pariwisata

No	Kegiatan	2	015	Efektivitas 2015
		Target %	Capaian	— %
			Kinerja %	

1.	Mengendalikan usaha jasa kepariwisataan	100	94	94
2.	Pengawasan dan mengendalikan usaha sarana pariwisata	100	93	93
3.	Mengendalikan usaha kepariwisataan daya tarik wisata	100	88	88
4.	Penganugerahan Tri Hita Karana Award	100	96	96
	Jumlah	100	93	93

Tabel 23.
Pengukuran Efektivitas pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk
Wisata

		V I I I I I	•	
No.	Kegiatan		2015	Efektivitas 2015
		Target %	Capaian Kinerja %	%
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata	100	94	94
	Total	100	94	94

Sumber: LAKIP DISPAR diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 23 mengenai pengukuran efektivitas pada program pengembangan dan pengelolaan produk wisata Dinas Pariwisata tahun 2015 didapatkan hasil rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 94%, sehingga membuat program pengembangan dan pengelolaan produk wisata dikatakan cukup efektif.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengukuran kinerja berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali berdasarkan seluruh program yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu terhadap tujuh program, maka dapat dibuat tabel pengukuran secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 24.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666

Pengukuran Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2015

No.	Program		2015		
	_	Ekonomi(Rp)	Efisiensi(%)	Efektivitas(%)	
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	43.879.000	104,2%	97%	
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	4.754.000	103,1%	97,92%	
3	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	117.553.894	108%	94%	
4	Pengembangan Destinasi Pariwisata	63.260.800	144,9%	69%	
5	Pengembangan Kemitraan	84.458.397	110%	89%	
6	Pengembangan Pariwisata	47.563.550	108%	93%	
7	Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata	29.591.740	106,4%	94%	

Berdasarkan Tabel 24 hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Pariwisata Bali ditinjau dari aspek ekonomi diketahui bahwa kinerja Dinas Pariwisata Bali tahun 2015 telah menjalankan seluruh programnya dengan ekonomis. Program pengembangan pemasaran pariwisata sebagai program dengan penghematan anggaran terbesar yaitu Rp 117.553.894. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program dengan penghematan terkecil yaitu menghemat anggaran sebesar Rp. 4.754.000.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja Dinas Pariwisata Bali berdasarkan tujuh program yang sudah dilaksanakan selama tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut. Pada program pelayanan administrasi perkantoran, dilihat dari tingkat

ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 43.879.000. Berdasarkan tingkat efisiensi program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 104.2%. Berdasarkan tingkat efektifitas program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 97%.

Pengukuran kinerja pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilihat dari tingkat ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 4.754.000. Berdasarkan tingkat efisiensi program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 103,1%. Berdasarkan tingkat efektifitas program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 97,92%. Untuk program pengembangan pemasaran pariwisata dilihat dari tingkat ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 117.553.894. Berdasarkan tingkat efisiensi program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 108%. Berdasarkan tingkat efektifitas program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan rasio efisiensi perkantoran sudah berjalan dengan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 94%.

Pengukuran kinerja pada program pengembangan destinasi pariwisata dilihat dari tingkat ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 63.260.800. Berdasarkan tingkat efisiensi program pengembangan destinasi pariwisata sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 144,9%. Berdasarkan tingkat efektifitas program

pengembangan destinasi pariwisata berjalan dengan kurang efektif dengan rasio efektivitas sebesar 69%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pariwisata guna mengkonfirmasi mengapa program ini kurang efektif didapatkan hasil bahwa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan tujuan

untuk mengembangkan potensi daerah tujuan wisata baru yang dilaksanakan pada

lima desa yaitu: Desa Wisata Pancasari Kabupaten Buleleng, Desa Wisata Undisan

Kabupaten Bangli, Desa Wisata Sibetan Kabupaten Karangasem, Desa Wisata

Munggu Kabupaten Badung dan Desa Wisata Delod Berawah Kabupaten Jembrana.

Pengukuran kinerja pada program pengembangan kemitraan dilihat dari tingkat ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 84.458.397. Berdasarkan tingkat efisiensi program pengembangan kemitraan sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 110%. Berdasarkan tingkat efektifitas program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan cukup efektif dengan rasio efektivitas sebesar 89%.

Pengukuran kinerja pada program pengembangan pariwisata dilihat dari tingkat ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan sebesar Rp. 47.563.550. Berdasarkan tingkat efisiensi program pengembangan kemitraan sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 108%. Berdasarkan tingkat efektifitas program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 93%.

Pengukuran kinerja pada program pengembangan dan pengelolaan produk wisata dilihat dari tingkat ekonomi program telah berjalan dengan ekonomis, dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 29.591.740. Berdasarkan tingkat efisiensi program pengembangan kemitraan sudah berjalan sangat efisien dengan rasio efisiensi sebesar 106,4%. Berdasarkan tingkat efektifitas program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 94%.

Penelitian ini juga meneliti mengenai dampak dan manfaat yang didapatkan dari terlaksananya program-program yang sudah dilaksanakan terhadap masyarakat dan pengembangan pariwisata Bali juga penting untuk diketahui, dimana dalam program kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata, Dinas Pariwisata berhasil mengembangkan daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata terhadap 5 desa, desa yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan diantaranya: Desa Wisata Pancasari Kabupaten Buleleng, Desa Wisata Undisan Kabupaten Bangli, Desa Wisata Sibetan Kabupaten Karangasem, dan Desa Wisata Munggu Kabupaten Badung.

Dinas Pariwisata dalam program kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri berhasil melaksanakan promosi pariwisata Bali dalam event-event pariwisata di dalam dan luar negeri.

Penyuluhan dan sosialisasi juga menjadi kegiatan yang penting dilakukan Dinas Pariwisata, terlihat dalam program kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Dinas Pariwisata berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan dan terbinanya kelompok sadar wisata. Sehingga pariwisata Bali yang berlandaskan budaya tidak tergusur oleh pariwisata modern.

Berdasarkan pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Bali tahun 2015 dengan

menggunakan konsep value for money yang dinilai dari aspek ekonomi, aspek

efisiensi dan aspek efektivitas berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) terhadap tujuh program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata Provinsi Bali tahun 2015 maka dapat di simpulkan: (1) Dinas Pariwisata

Bali berdasarkan aspek ekonomi menunjukan kinerjanya berjalan dengan ekonomis.

Program pengembangan pemasaran pariwisata sebagai program dengan penghematan

anggaran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program

dengan penghematan terkecil yaitu menghemat anggaran, (2) Rasio efisiensi rata-rata

diatas 100%. Yang tertingi adalah program pengembangan destinasi pariwisata

sebagai program dengan tingkat efisiensi yaitu 144,9%, (3) Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur sebagai program dengan efektivitas tertinggi. Namun

ada satu program yang dijalankan tidak efektif yaitu program pengembangan

destinasi pariwisata.

Peneliti mengajukan saran Kepada Dinas Pariwisata Bali berdasarkan hasil

analisis diharapkan agar terus memaksimalkan kinerja yang dilakukan terutama

program yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi pariwisata Bali. Bagi

peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tidak hanya pada Dinas Pariwisata

saja, tetapi pada Dinas lain yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bali.

1663

DAFTAR REFERENSI

- Afiati, Tri Astuti. 2011. Analisis *Value For Money* Pada Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang.
- Alwardat and Benamraoui. 2014. Value for Money and Audit Practice: Lessons and Facts from the Literature. *Life Science Journal* Volume: 11(2s).
- Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value for Money. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Ardila, Isna. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhamadiah Sumatra Utara*. Volume 15 No.1.
- Arfan, Demi Aulia. 2014. Analisis Value For Money dalam pengukuran kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Barnet et al. 2010. Measuring the Impact and Value for Money of Governance & Conflict Programmes. Diunduh dari http://www.dfid.gov.uk/r4d/pdf/outputs/mis_spc/ 60797_itad-fvm report-dec10.pdf, tanggal 5 Maret 2016.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2016. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
- Emmi, dkk. 2011. Value for Money: Current Approaches and Evolving Debates. LSE. London.
- Fattah, Sanusi dan Irman. 2012. Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal* Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makassar.
- Franco, Santos M., Lucianetti L, Bourne M. 2012. Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research. Management Accounting Research, 23(2) 79-119.
- Kloviene, L, & Gimzauskiene, E. 2009. Performance measurement system changes according to organization's external and internal environment. *Economics & Management*, 70-77.

- Kompas.com 2016. Bali Pulau Terbaik Kedua Didunia http://travel.kompas.com/read/2016/01/04/173936827/Bali.Pulau.Terbaik.Kedua.di.Dunia. Diunduh tanggal 16 Juli 2016.
- Lucianetti, Lorenzo. 2014. The Effect of Performance Measurement Systems on Firm Performance: A Cross-Sectional and a Longitudinal Study. *Journal of Operations Management* 32 (2014) 313-336.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal* Akuntansi Pemerintah.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moxham, C. 2009. Performance measurement Examining the applicability of the existing body of knowledge to non-profit organisations. *International Journal of Operations and Production Management*, 29, pp. 740-763.
- Naim, Nasril. 2013. Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pavlov, A., Bourne, M. 2011. Explaining the effects of performance measurement on performance: norganizational routines perspective. Int. J. Oper. Prod. Manage. 31 (1),101–122.
- Philippe Burger and Ian Hawkesworth. 2011. How To Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement. OECD.
- Richard, P.J., Devinney, T.M., Yip, G.S. and Johnson, G. (2009). Measuring organisational performance: Towards methodological best practice. Journal of Management, 35, pp. 718-804.
- Sangmi, M., Tabassum, N. 2010. Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: Application of CAMEL Model. *Pakistan Journal Commercial Social Sciences*.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

- Taylor, 2013. Antecedents of effective performance measurement system implementation: an empirical Study of UK Manufacturing firms. Int. J.Prod.Res. 51(18), 1–14.
- Wandari, I Desak Nyoman Tri. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *E-journal* S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 3. No.1.
- Watermeyer, Ron. 2013. Value For Money In The Delivery Of Public Infrastructure. West Africa Built Environment Research Conference, Accra, Ghana.
- Wood, D.J. 2010. Measuring Corporate Social Performance: A Review.International Journal of Management Reviews,12, pp. 50-84.
- Zurich. Eth dkk. 2013. Time Value of Money Essentials in Credit Risk, Liquidity and Funding. Swiss Finance Institute Conference.